



BULETIN KEGIATAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BPSDM) PROVINSI JAMBI

TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah *rabbi' alamin*, dengan karunia dan rahmat Allah *Subhanahu Wata'ala*, telah dapat menyelesaikan Buletin Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi Tahun 2022.

Tujuan penerbitan buletin ini sebagai memori atas terlaksanannya program dan kegiatan BPSDM Provinsi Jambi tahun 2022, sebagai indikator tercapainya target kinerja institusi. Sungguhpun demikian, buletin tidak memaparkan secara utuh proses pelaksanaan program dan kegiatan, akan tetapi hanya gambaran umum terhadap program dan kegiatan.

Buletin ini tidak diterbitkan secara cetak, akan tetapi diupload dimedia sosial seperti website PPID dan facebook BPSDM Provinsi Jambi. Penerbit mengucapkan terimakasih atas dukungan dan dorongan pada pihak terkait, dan senantiasa mengharapkan keritikan dan masukan yang konstruktif atas kesempurnaan buletin ini. Selanjutnya, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penerbitan buletin BPSDM Provinsi Jambi tahun 2022.

Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan IV Provinsi Jambi Tahun 2022

Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan IV Provinsi Jambi Tahun 2022 Selasa, 15 Februari 2022 bertempat di aula II Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi, dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Bapak H. Sudirman, S.H., M.H., dengan didampingi Kepala Badan Bapak H. M. Iskandar Nasution, S.H., M.Si. Acara pembukaan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Badan Bapak Muhammad Arif, S.E., M.M., Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial (PKM) Bapak H. Abdul Mukti, S.Pd., M.H., Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Ibu Melahani, S.E., M.M., Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan Bapak Drs. Muhammad, M.M., Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Fungsional Bapak Dr. Zarmaili, M.M., Pejabat PKP, Widyaiswara BPSDM beserta jajaran staf. Dalam kata sambutannya Sekda mengharapkan agar para peserta yang mengikuti PKA dapat menjadi pemimpin atau leader yang memiliki kompetensi kinerja sebagai manajerial untuk menjamin terlaksanannya akuntabilitas jabatan administrator, dan memiliki kemampuan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pengawas dan pelaksana dalam memberikan pelayanan publik sesuai SOP dan terselenggaranya peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Selain itu juga harus memiliki komitmen untuk bersedia mendengarkan masukan serta kritikan demi tercapainya tujuan yang diharapkan, juga memiliki hati nurani, berbudaya kerja yang tinggi sebagai upaya menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Jumlah peserta : 30 (tiga puluh) Orang yang berasal dari OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan IV Provinsi Jambi Tahun 2022 mulai tanggal 15 Februari 2022 s/d 24 Mei 2022. Tujuan Kegiatan pelatihan ini adalah :

- Menciptakan pemimpin atau leader yang memiliki kompetensi kinerja sebagai manajerial
- Menjamin terlaksanannya akuntabilitas jabatan administrator, dan memiliki kemampuan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pengawas dan pelaksana dalam memberikan pelayanan publik sesuai SOP
- Terselenggaranya peningkatan kinerja secara berkesinambungan.
- Memiliki komitmen untuk bersedia mendengarkan masukan serta kritikan demi tercapainya tujuan yang diharapkan, juga memiliki hati nurani, berbudaya kerja yang tinggi sebagai upaya menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.









Pembukaan PKP Angkatan III Tahun 2022

Guna memenuhi standar kompetensi manajerial dan mengembangkan kompetensi kepemimpinan bagi pejabat pengawas, perlu didukung adanya pelaksanaan pengembangan kompetensi manajerial. Untuk itu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Kompetensi (PKP) dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi 3 bulan terhitung mulai tanggal 21 Februari 2022 s/d 3 Juni 2022.

Pada hari Senin, 21 Februari 2022 bertempat di ruang aula II Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi, Wakil Gubernur Jambi Bapak Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I., didampingi Kepala Badan Bapak H.M. Iskandar Nasution, S.H., M.Si., membuka kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Kompetensi (PKP) dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dan dihadiri para kepala OPD, kepala Bidang PKM, Kepala Bidang PKTI, Kepala Bidang SKPK, Kepala Bidang PKTUF, Widyaiswara beserta jajaran staf.

Wakil Gubernur Jambi menyampaikan bahwa pengetahuan tentang kepemimpinan dan pengawasan merupakan salah satu pengetahuan yang dirasa paling bermanfaat yang didapat dalam pelatihan PKP ini. Menurutnya dalam hal kepemimpinan memerlukan kemampuan khusus, terlebih pemimpin organisasi "Sehingga materi di pelatihan ini mengajarkan pola kepemimpinan apa yang seharusnya dilakukan, terutama *highlight* kepemimpinan 'melayani' bukan 'memerintah'. Manajemen pengawasan menjadi salah satu mekanisme kontrol dalam pelaksanaan pekerjaan,"

Melalui pelatihan ini diharapkan seorang pemimpin pengawas dapat menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan pengawas yang ditunjukkan dengan kemampuan dalam memimpin pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dibawahnya khususnya dalam memberikan pelayanan publik. "Seorang pemimpin pengawas harus dapat menjamin pelaksanaan pekerjaannya, sudah sesuai SOP dan mempunyai tujuan utama untuk peningkatan kualitas pelayanan publik itu sendiri

Selain itu, melalui pelatihan ini diharapkan dapat terwujud sosok kepemimpinan berkinerja dengan memiliki kemampuan pengendalian pelayanan publik yang inovatif, kolaboratif dan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal serta mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan bekal pembelajaran-pembelajaran yang diikuti selama pelatihan ini diharapkan para peserta mampu membuat perubahan kinerja organisasi menjadi lebih baik lagi. Terdapat pembelajaran aktualisasi kepemimpinan pengawas, dengan praktek nyata melalui aksi perubahan dalam organisasinya, merupakan bentuk nyata bahwa pelatihan ini, tidak sekedar sebuah proses pembelajaran yang berakhir setelah penutupan. "Hasil inovasi gagasan proyek perubahan yang telah disusun Bapak/Ibu dapat terus dikawal pelaksanaannya sampai dapat dirasakan kebermanfaatannya khususnya bagi unit organisasi kita, agar perbaikan kualitas pelayanan yang diberikan. Jumlah peserta 25 Orang























Penyuluhan Anti Korupsi Bagi Anggota DPRD Kabupaten Kota Se- Provinsi Jambi Tahun 2022

Pada hari Selasa, 1 Maret 2022 bertempat di ruang aula II BPSDM Gubernur Jambi Bapak Dr. Al Haris S.Sos., M.Si membuka acara kegiatan Penyuluh Anti Korupsi Bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi dengan didampingi Wakil Ketua KPK RI Ibu Dr. Lili Pintauli Siregar, S.H., M.H., Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, S.H.I., M.Si., Kepala BPSDM Provinsi Jambi Bapak H.M. Iskandar Nasution S.H., M.Si., dan dihadiri Pejabat PKA dan PKP, Widyaiswara BPSDM Provinsi Jambi, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi.

Jumlah peserta sebanyak 50 (lima puluh) Orang, dengan asal peserta yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Se-provinsi Jambi. Narasumber berasal dari KPK RI, Inspektorat Provinsi Jambi.

Tujuan kegiatan penyuluhan ini adalah :

- Dalam upaya pencegahan korupsi,
- memperkuat pemberantasan korupsi, dengan penekanan pada aspek pencegahan (preventif), yang tentunya berdampak positif terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta meningkatkan pembangunan, daya saing, dan kemajuan Provinsi Jambi.
- memberikan pencerahan bagi penyelenggara pemerintahan di daerah untuk menegaskan kembali komitmen dalam melaksanakan pemerintahan yang bersih bebas korupsi.
- memberikan pencerahan, penyuluhan agar kita, dan rekan rekan DPRD bisa bekerja dengan baik, amanah sesuai dengan undang undang, dan mencegah tindak pidana korupsi serta memiliki integritas sehingga APBD di daerah itu bisa maksimal untuk kepentingan rakyat
- mengingatkan kepada seluruh Kepala Daerah termasuk anggota DPRD di wilayah Provinsi Jambi agar menghindari tindak pidana korupsi
- menekankan kepada setiap Kepala Daerah termasuk para anggota DPRD di Provinsi Jambi agar benar-benar bekerja dan menghindari pemakaian rompi orange
- untuk memperbaiki diri dan benar benar mulai untuk mengikuti peraturan yang berlaku, jangan ada lagi yang bermain curang

“Wakil Ketua KPK RI, Lili Pintauli Siregar tadi telah memberikan pencerahan anti korupsi kepada kita semua, juga untuk Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi. Kita dalam bekerja memerlukan rambu-rambu yang terukur dan jelas, untuk itu KPK











Bimtek Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

Bimtek Bendahara Pengeluaran merupakan salah satu langkah strategis yang harus dilakukan dalam rangka merespon tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dengan Bimtek Bendahara Pengeluaran ini diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata kelola keuangan yang baik, karena ini merupakan kunci kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yaitu dengan mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang di susun secara akurat.

Dalam tata kelola keuangan daerah, selalu adanya perubahan peraturan, baik terkait dengan penatausahaan keuangan daerah yang dikaitkan dengan pengadaan barang/ jasa, juga masalah perpajakan, yang terakhir ditetapkannya Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. Mengharuskan Saudara untuk selalu menyesuaikan dan menerapkan dengan ketentuan yang baru, yang harus dipahami dan dikuasai sebagai Pengelola Keuangan Daerah, agar terhindar dari kesalahan prosedur bahkan kerugian daerah.

BPSDM Provinsi Jambi mengadakan Bimtek Bendahara yang diikuti oleh 25 (dua puluh lima) orang peserta yang berasal dari OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Dibuka secara langsung oleh Kepala BPSDM Provinsi Jambi, H.M. Iskandar Nasution, SH, M.Si. dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada para peserta yang hadir pada kegiatan Bimtek Bendahara Pengeluaran TA 2022. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa dengan diadakannya Bimtek ini peserta harus mampu mengoptimalkan potensi dalam diri mereka untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara sebagai ASN. Sehingga sekembalinya peserta ke unit kerja masing-masing peserta telah memiliki kemampuan dan dapat segera meningkatkan kinerja dan selalu konsisten dengan tata kelola keuangan yang baik dan benar

Bimtek Bendahara Pengeluaran TA 2022 dilaksanakan selama 3 hari terhitung dari tanggal 21-23 Maret 2022, dengan narasumber bimbingan teknis berasal dari BPSDM Kemendagri, BPSDM Provinsi Jambi, BPKPD Provinsi Jambi

Kabid Teknis INTI, Melahani, SE, MM, mengawali kegiatan dengan menyampaikan laporan bahwa Bimtek Bendahara Pengeluaran TA 2022 diselenggarakan sebagai salah satu perwujudan peningkatan SDM ASN untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang pengelolaan keuangan daerah khususnya bagi bendahara

pengeluaran sehingga peserta diharapkan akan mampu melakukan tugasnya dengan lebih kompeten sesuai dengan aturan dan perundang-undanganyang berlaku.

Dengan Bimtek ini diharapkan pula mampu meningkatkan kapasitas, kompetensi, profesional aparatur pengelolaan keuangan daerah dalam menjalankan peran dan fungsinya, sehingga kinerja pengelolaan dan penatausahaan keuangan senantiasa konsisten, dengan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam ranah pelayanan publik terutama untuk membentuk pengetahuan serta meningkatkan keterampilan pengelolaan keuangan serta membentuk sikap bendahara pengeluaran sebagai salah satu Pengelola Keuangan untuk menjalankan tugas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.

Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sekretaris OPD Pemerintah Provinsi Jambi

Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sekretaris OPD Pemerintah Provinsi Jambi dibuka pada tanggal 24 s/d 26 Maret 2022. Jumlah peserta 35 orang berasal dari OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dan dibuka oleh Kepala BPSDM Provinsi Jambi Bapak H. Iskandar Nasution, SH, M. Si, dihadiri oleh Pejabat di lingkungan BPSDM Provinsi Jambi.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi Bapak H. Iskandar Nasution, SH, M. Si menegaskan, bahwa peran sekretaris dalam suatu organisasi perangkat daerah sangat penting. Keberhasilan suatu daerah sangat tergantung pada kinerja sekretaris.

Sekretaris bukan jabatan yang enteng. Ia juga bertanggung jawab atas segala pekerjaan kepala perangkat daerah, penyelenggaraan dan pelaksanaan organisasi, pengelolaan keuangan daerah hingga pengelolaan barang milik daerah demi tercapainya tujuan organisasi dengan baik.

Kinerja organisasi akan terganggu jika sekretaris tak memiliki kompetensi serta kemampuan manajerial yang cukup baik. Oleh sebab itu, Kepala BPSDM Provinsi Jambi mendorong agar sekretaris perlu meningkatkan kapasitas kompetensi dirinya. Skill dan kompetensi sangat dibutuhkan terlebih lagi di era seperti saat ini.

“Jadilah pembelajar yang baik dengan terus belajar. Diklat hanyalah file lighter atau pemantik untuk terus belajar dengan logis di era disrupsi, era revolusi industri 4.0 ataupun era digital. Ada banyak sumber pembelajaran yang tersedia melalui akses internet. Kita dapat belajar apa saja dan tersedia di banyak platform digital,” ucapnya.

Acara Penutupan Bimtek Peningkatan Kapasitas Sekretaris OPD Pemerintah Provinsi Jambi yang ditutup secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Bapak H. Sudirman, SH, MH di dampingi Oleh Kepala BPSDM Provinsi Jambi Bapak H. Iskandar Nasution, SH, M. Si, dilaksanakan oleh Bidang PKM BPSDM Provinsi Jambi dan sebagai ketua pelaksana kegiatan Bapak. H. Abdul Mukti, S.Pd, MH. Pada hari ini Sabtu, 26 Maret 2022.



Bimbingan Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas Tanggal 18 s/d 20 Mei 2022

Tata Naskah dinas adalah pengelolaan informasi yang tertulis dalam bentuk surat, yang meliputi pengaturan mengenai jenis, format, penyampaian, pengamanan, pengabsahan, distribusi, penyampaian naskah dinas, serta media yang akan digunakan untuk komunikasi kedinasan di bidang pemerintahan.

Fungsi Tata Naskah Dinas sangat penting untuk pelaksanaan tugas dan memperlancar tercapainya tujuan suatu organisasi. Maka untuk membuat Tata Naskah Dinas harus hati-hati, cermat dan sesuai dengan pedoman yang telah diberikan sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang pada gilirannya berpengaruh pada kinerja suatu organisasi atau menimbulkan penilaian masyarakat yang kurang baik.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mendukung kelancaran tertib administrasi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilakukan penyeragaman tata naskah dinas, di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas guna mendukung kebijakan serta regulasi terbaru, BPSDM Provinsi Jambi mengadakan Bimtek Penyusunan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. kegiatan diselenggarakan pada Tanggal 18 s/d 20 Mei 2022. Diikuti oleh 25 Orang peserta yang terdiri dari 13 orang laki-laki dan 12 orang perempuan yang berasal dari OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi.

Peserta bimbingan teknis dibekali dengan berbagai materi dan pengetahuan oleh para tutor yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara. Narasumber yang memberikan materi terdiri dari Narasumber Biro Organisasi dan Tata Laksana Setjen Kemendagri RI, BPSDM Provinsi Jambi dan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi. Secara umum kegiatan berjalan dg lancar sesuai pada waktu nya serta tidak terdapat kendala yang berarti.

Bimbingan Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional, Bapak DR. H. Zarmaili, MM, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 yang dihadiri para pejabat Struktural di Lingkungan BPSDM Provinsi Jambi beserta staf dan Widyaiswara .Dalam sambutannya, beliau mengharapkan agar seluruh peserta bersungguh-sungguh dalam mengikuti Bimtek dan bila ad yang belum memahami untuk bertanya kepada narasumber .agar mampu menyerap informasi secara keseluruhan.





Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Tahun 2022

Pada hari Senin, 21 Februari 2022 bertempat di ruang aula II, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi Bapak H.M. Iskandar Nasution, S.H., M.Si. membuka acara Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Tahun 2022, didampingi Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Ini Ibu Melahani, S.E., M.M., dan dihadiri Kepala bidang PKM, Kepala Bidang PKTUF, Kepala Bidang SKPK, dan para Widyaiswara BPSDM Provinsi Jambi beserta staf. Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Tahun 2022 dilaksanakan dari tanggal 21 s.d 23 Februari 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yang berasal dari berbagai OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Narasumber berasal dari Kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak RI, Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk Provinsi Jambi, BPSDM Provinsi Jambi, Tim Fasilitator PUG Provinsi Jambi.

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan pada dasarnya sudah dimulai sejak Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2014, PUG merupakan salah satu arus utama yang harus dilaksanakan dalam pembangunan disamping pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. PPRG ini merupakan strategi nasional percepatan pengarusutamaan gender yang telah dikukuhkan melalui Surat Edaran Bersama (SEB) antara empat Menteri yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No 270/M.PPN/11/2012, Menteri Keuangan dengan No: SE.33/MK.02/2012, Menteri Dalam Negeri No:050/4379A/SJ dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender. Di daerah, pelaksanaan PPRG sebenarnya sudah diamanatkan dalam Permendagri

Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah, namun penegasan untuk melaksanakan PPRG melalui analisis gender baru tercantum dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 sebagai Perubahan dari Permendagri Nomor 15 Tahun 2008. Permendagri tersebut menjelaskan tahapan pelaksanaan PUG mulai dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Monitoring dan Evaluasi. Pelaksanaan strategi PUG ini mengacu pula pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah junto Permendagri no 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sejak dikeluarkannya Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tersebut, telah banyak provinsi dan kabupaten/kota yang melakukan inisiasi PPRG yang wujudnya adalah tersusunnya Anggaran Responsif Gender (ARG) bagi program-program dan kegiatan pada beberapa SKPD. Sekaitan dengan perkembangan pelaksanaan PPRG yang cakupannya terus meluas maka diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi optimal dalam melaksanakan PPRG tersebut

terutama di daerah. Untuk itu perlu dibuat modul pelatihan penyusunan PPRG dan teknik fasilitasi bagi daerah yang tujuannya menyiapkan tenaga terlatih dalam menyusun PPRG sesuai dengan ketentuan dan prioritas pembangunan khususnya di lingkungan Pemerintahan Daerah dan memberikan pendampingan atau fasilitasi bagi SKPD yang membutuhkan.

















Pembukaan Sosialisasi LHKPN Bagi Pejabat Pengawas Provinsi Jambi Tahun 2022

Pada hari Jumat, 4 Maret 2022 bertempat di ruang aula II, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial (PKM)BPSDM Provinsi Jambi Bapak H. Abdul Mukti, S.Pd., M.H., mewakili Kepala Badan Bapak H.M. Iskandar Nasution, S.H., M.Si., membuka acara sosialisasi LHKPN Bagi Pejabat Pengawas Se-Provinsi Jambi. Turut hadir dalam pembukaan para pejabat PKA, PKP, Widyaiswara beserta staf.

Jumlah peserta sebanyak 50 (lima puluh) Orang, yang berasal adari OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Narasumber BKD Provinsi Jambi, Kepala BPSDM Provinsi Jambi. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang disampaikan kepada KPK bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara agar terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta perbuatan tercela lainnya. Oleh karena itu setiap Penyelenggara Negara dituntut untuk melaporkan kekayaannya melalui format LHKPN yang ditetapkan oleh KPK yang diisi secara jujur, benar dan lengkap serta disampaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang ada. Pimpinan KPK ingin mengajak seluruh elemen bangsa untuk berperan secara aktif mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi.







**Pelatihan Peningkatan Budaya Kerja Aparatur
Tanggal 23 s/d 28 Mei 2022**

Budaya Kerja adalah” sikap dan perilaku individu dari kelompok aparatur Negara yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.” budaya kerja aparatur negara dapat diartikan sebagai sikap, perilaku individu, dan kelompok aparatur negara yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini.

Tantangan yang dihadapi aparatur di daerah saat ini cukup besar, mengingat masih banyaknya para pemimpin serta aparatur di daerah yang masih abai terhadap nilai-nilai moral dan budaya kerja. Untuk itu perlu segera diwujudkan budaya kerja aparatur di daerah untuk mewujudkan kesejahteraan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Tujuan utama Budaya kerja adalah untuk mengubah sikap dan perilaku aparatur agar bisa meningkatkan produktifitasnya dalam menghadapi berbagai masalah yang akan datang (Fernandez, 2006). Hasil penelitian Hartman dan Hayden (2005), menjelaskan bahwa unsur utama keberhasilan masa depan bisnis ada pada unsur manusia yang dibentuk dari budaya kerja positif. Dalam meraih tujuan organisasi, budaya kerja memiliki peranan yang sangat penting seperti layaknya mata rantai, yang saling terkait dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Kekuatan rantai yang saling terpaut ini tergantung kepada rangkaian terlemah pada proses individual. Hasil penelitian Apriyanti (2008) menyebutkan enam faktor yang memengaruhi budaya kerja yakni tanggung jawab, inovasi, orientasi pada hasil, pengetahuan, sistem kerja, dan motivasi. Sedangkan hasil penelitian Barkow (2002) menyebutkan beberapa faktor yang dapat memengaruhi budaya kerja seperti kemampuan dalam beradaptasi, integrasi sosial, moral, serta faktor persepsi terhadap kerja merupakan faktor-faktor. Meski telah diatur dengan jelas tentang apa dan bagaimana budaya kerja seharusnya, pada kenyataannya masih banyak aparatur negara yang abai terhadap nilai-nilai moral dan budaya kerja. Tanpa adanya budaya kerja yang menjadi nafas dalam perilaku aparatur, maka akan sulit mewujudkan cita-cita dalam menciptakan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat secara baik dan benar. Karenanya dirasa perlu untuk melakukan penelitian membangun dan Budaya Kerja aparatur di Provinsi Jambi demi terwujudnya kesejahteraan dan pelayanan masyarakat secara baik dan benar. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini kita telah memasuki era Reformasi Birokrasi dimana hakekatnya adalah perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) aparatur negara. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 53/2010 tentang Disiplin PNS, merupakan langkah awal untuk menciptakan aparatur yang profesional. Pelatihan Peningkatan Budaya Kerja Aparatur yang dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Jambi merupakan salah satu cara dalam menciptakan aparatur yang profesional, yang pada saat ini tengah dilaksanakan dengan diikuti oleh 25 (dua puluh lima) orang peserta yang terdiri dari 11 orang laki-laki dan 14 orang perempuan. Yang berasal dari OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022. Perubahan pola pikir dan peningkatan budaya kerja pada dasarnya merupakan inti dari Reformasi Birokrasi, dimana aparatur Negara harus melayani bukan dilayani. Tujuan dari pelaksanaan pelatihan ini adalah :

- 1) Mengetahui peta SDM untuk melihat potensi bersaing dan efektivitas kerjanya di masa depan;
- 2) Peningkatan loyalitas dan kerjasama untuk menciptakan sinergi dalam pemecahan masalah dan mewujudkan visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum;
- 3) Menerapkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah tertanam pada Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu Rasional, Kerjasama Tim, Inovasi, Efisiensi dan Efektivitas, Responsif, Kemitraan, Bekerja Keras, Bergerak Cepat, dan Bertindak Tepat.

Peserta dibekali dengan berbagai materi dan pengetahuan oleh para tutor yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara. Narasumber yang memberikan materi terdiri dari Narasumber Kemenpan. Secara umum kegiatan berjalan dg lancar sesuai pada waktu nya serta tidak terdapat kendala yang berarti.

Pelatihan Pelatihan Peningkatan Budaya Kerja Aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi, H.M. Iskandar Nasution, SH, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 dan dihadiri para pejabat Struktural di Lingkungan BPSDM Provinsi Jambi beserta staf dan Widyaiswara. Dalam sambutannya, beliau mengharapkan agar seluruh peserta bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelatihan dan bila belum memahami untuk bertanya kepada narasumber agar mampu menyerap informasi secara keseluruhan.







**Pelatihan Peningkatan Budaya Kerja Aparatur
Tanggal 23 s/d 28 Mei 2022**

Budaya Kerja adalah” sikap dan perilaku individu dari kelompok aparatur Negara yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.” budaya kerja aparatur negara dapat diartikan sebagai sikap, perilaku individu, dan kelompok aparatur negara yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini.

Tantangan yang dihadapi aparatur di daerah saat ini cukup besar, mengingat masih banyaknya para pemimpin serta aparatur di daerah yang masih abai terhadap nilai-nilai moral dan budaya kerja. Untuk itu perlu segera diwujudkan budaya kerja aparatur di daerah untuk mewujudkan kesejahteraan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Tujuan utama Budaya kerja adalah untuk mengubah sikap dan perilaku aparatur agar bisa meningkatkan produktifitasnya dalam menghadapi berbagai masalah yang akan datang (Fernandez, 2006). Hasil penelitian Hartman dan Hayden (2005), menjelaskan bahwa unsur utama keberhasilan masa depan bisnis ada pada unsur manusia yang dibentuk dari budaya kerja positif. Dalam meraih tujuan organisasi, budaya kerja memiliki peranan yang sangat penting seperti layaknya mata rantai, yang saling terkait dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Kekuatan rantai yang saling terpaut ini tergantung kepada rangkaian terlemah pada proses individual. Hasil penelitian Apriyanti (2008) menyebutkan enam faktor yang memengaruhi budaya kerja yakni tanggung jawab, inovasi, orientasi pada hasil, pengetahuan, sistem kerja, dan motivasi. Sedangkan hasil penelitian Barkow (2002) menyebutkan beberapa faktor yang dapat memengaruhi budaya kerja seperti kemampuan dalam beradaptasi, integrasi sosial, moral, serta faktor persepsi terhadap kerja merupakan faktor-faktor. Meski telah diatur dengan jelas tentang apa dan bagaimana budaya kerja seharusnya, pada kenyataannya masih banyak aparatur negara yang abai terhadap nilai-nilai moral dan budaya kerja. Tanpa adanya budaya kerja yang menjadi nafas dalam perilaku aparatur, maka akan sulit mewujudkan cita-cita dalam menciptakan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat secara baik dan benar. Karenanya dirasa perlu untuk melakukan penelitian membangun dan Budaya Kerja aparatur di Provinsi Jambi demi terwujudnya kesejahteraan dan pelayanan masyarakat secara baik dan benar. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini kita telah memasuki era Reformasi Birokrasi dimana hakekatnya adalah perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) aparatur negara. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 53/2010 tentang Disiplin PNS, merupakan langkah awal untuk menciptakan aparatur yang profesional. Pelatihan Peningkatan Budaya Kerja Aparatur yang dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Jambi merupakan salah satu cara dalam menciptakan aparatur yang profesional, yang pada saat ini tengah dilaksanakan dengan diikuti oleh 25 (dua puluh lima) orang peserta yang terdiri dari 11 orang laki-laki dan 14 orang perempuan. Yang berasal dari OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022. Perubahan pola pikir dan peningkatan budaya kerja pada dasarnya merupakan inti dari Reformasi Birokrasi, dimana aparatur Negara harus melayani bukan dilayani. Tujuan dari pelaksanaan pelatihan ini adalah :

- 1) Mengetahui peta SDM untuk melihat potensi bersaing dan efektivitas kerjanya di masa depan;
- 2) Peningkatan loyalitas dan kerjasama untuk menciptakan sinergi dalam pemecahan masalah dan mewujudkan visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum;
- 3) Menerapkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah tertanam pada Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu Rasional, Kerjasama Tim, Inovasi, Efisiensi dan Efektivitas, Responsif, Kemitraan, Bekerja Keras, Bergerak Cepat, dan Bertindak Tepat.

Peserta dibekali dengan berbagai materi dan pengetahuan oleh para tutor yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara. Narasumber yang memberikan materi terdiri dari Narasumber Kemenpan. Secara umum kegiatan berjalan dg lancar sesuai pada waktunya serta tidak terdapat kendala yang berarti.

Pelatihan Pelatihan Peningkatan Budaya Kerja Aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi, H.M. Iskandar Nasution, SH, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 dan dihadiri para pejabat Struktural di Lingkungan BPSDM Provinsi Jambi beserta staf dan Widyaiswara. Dalam sambutannya, beliau mengharapkan agar seluruh peserta bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelatihan dan bila belum memahami untuk bertanya kepada narasumber agar mampu menyerap informasi secara keseluruhan.







**Bimbingan Teknis Fungsional Penyuluh Sosial Bagi ASN Kabupatn/Kota
Se-Provinsi Jambi
Tanggal 30 Maret s/d 1 April 2022**

Mengingat pentingnya peran dan fungsi penyuluh sosial bagi Aparatur Sipil Negara serta mengingat Sampai saat ini Pemerintah Provinsi Jambi masih kekurangan Aparatur Sipil Negara bagi fungsional penyuluh sosial, dan untuk menjawab tantangan tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi termotivasi untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Bagi Fungsional penyuluh sosial, yang diikuti oleh 25 (dua puluh lima) orang ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi.

Peserta bimbingan teknis dibekali dengan berbagai materi dan pengetahuan oleh para tutor yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara. Narasumber yang memberikan materi terdiri dari Narasumber Kemensos RI, BNN Provinsi Jambi, Ombudsman Perwakilan Provinsi Jambi, WI BPSDM Provinsi Jambi, dan Dinsos Dukcapil Provinsi Jambi. Secara umum kegiatan berjalan dg lancar sesuai pada waktunya serta tidak terdapat kendala yang berarti.

Fungsional penyuluh sosial adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan, ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Bimtek bagi fungsional penyuluh sosial sangatlah penting untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam rangka membangun daerah, dan mengembangkan perekonomian, baik yang ditingkat pusat maupun di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selain itu juga, usaha proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebaran informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi oleh penyuluh sosial baik secara lisan, tulisan maupun peragaan kepada kelompok sasaran sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuannya dan kemauan guna berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan hal tersebut, Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kemampuan serta mempunyai pengetahuan dan wawasan luas di bidang penyuluh sosial.

Bimbingan Teknis Bagi Fungsional penyuluh sosial di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi dibuka secara resmi oleh Bapak Asisten Administrasi umum Mohza, S.Pd, M.Si, pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 dan dihadiri para pejabat Struktural di Lingkungan BPSDM Provinsi Jambi beserta staf dan Widyaiswara. Dalam sambutannya, beliau mengharapkan agar seluruh peserta bersungguh-sungguh dalam mengikuti Bimtek dan bila ada yang belum memahami untuk bertanya kepada narasumber .agar mampu menyerap informasi secara keseluruhan.





Kunjungan Audensi dan Benchmarking Pengembangan SDM PTPN VI

Kepala BPSDM Provinsi Jambi Menerima Kunjungan Audensi dan Benchmarkin PTPN VI dalam rangka Pengembangan SDM berkelanjutan di ruang kerja Kepala BPSDM Provinsi Jambi pada hari Senin 30 Mei 2022, peserta kunjungan sebanyak 5 orang yang merupakan Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian serta SEVP Bussiness Support PTPN VI.

